

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 22 TAHUN  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2012  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANOKWARI**

**Menimbang:**

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun anggaran 2012;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor     Tahun     tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MANOKWARI**

**dan**

**BUPATI MANOKWARI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI**

**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 938,289,860,519.00	
b. Belanja	<u>Rp 991,458,595,388.00</u>	
Surplus/Defisit		Rp (53,168,734,869.00)
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp 123,387,095,692.00	
Pengeluaran	<u>Rp 58,433,000,000.00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp 64,954,095,692.00

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 20,579,626,286.00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 958,869,486,805.00
b. Realisasi	<u>Rp 938,289,860,519.00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 20,579,626,286.00

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 32,662,346,359.00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1,023,823,582,497.00
b.	Realisasi	<u>Rp 991,458,595,388.00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 32,364,987,109.00

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (12,082,720,073.00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (64,954,095,692.00)
b.	Realisasi	<u>Rp (53,168,734,869.00)</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (11,785,360,823.00)

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 123,387,095,692.00
b.	Realisasi	<u>Rp 123,387,095,692.00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0.00

5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 58,433,000,000.00
b.	Realisasi	<u>Rp 58,433,000,000.00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0.00

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 64,954,095,692.00
b.	Realisasi	<u>Rp 64,954,095,692.00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0.00

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 2,200,102,732,053.74
b. Jumlah kewajiban	Rp. 2,339,178,230.00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2,197,763,553,823.74

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 31 Desember 2012	Rp 7,509,845,692.00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 155,165,782,022.00
c. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non-keuangan	Rp (208,334,516,891.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 57,444,250,000.00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 2,339,178,230.00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2012	Rp 14,124,539,053.00

#### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- Lampiran II : Neraca
- Lampiran III : Laporan arus kas
- Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

### **Pasal 9**

Bupati Manokwari menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manokwari

Pada tanggal 25 Oktober 2013

BUPATI MANOKWARI



diundangkan di Manokwari

pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

Drs. F. M. LALENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2013 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	Persen
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>958,869,486,805.00</b>	<b>938,289,860,519.00</b>	<b>20,579,626,286.00</b>	<b>97.85</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>32,265,733,128.00</b>	<b>28,044,312,311.00</b>	<b>4,221,420,817.00</b>	<b>86.91</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11,322,244,290.00	10,021,214,863.00	1,301,029,427.00	88.50
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5,880,700,000.00	4,566,939,681.00	1,313,760,319.00	77.65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,958,720,088.00	6,958,720,088.00	0.00	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,104,068,750.00	6,497,437,679.00	1,606,631,071.00	80.17
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>899,772,772,677.00</b>	<b>885,076,828,458.00</b>	<b>14,695,944,219.00</b>	<b>98.36</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>755,189,129,689.00</b>	<b>743,410,381,590.00</b>	<b>11,778,748,099.00</b>	<b>98.44</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	103,948,029,633.00	92,922,196,365.00	11,025,833,268.00	89.39
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39,707,215,056.00	38,954,300,225.00	752,914,831.00	98.10
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	557,019,915,000.00	557,019,915,000.00	0.00	100.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	54,513,970,000.00	54,513,970,000.00	0.00	100.00
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>132,406,742,988.00</b>	<b>132,406,742,987.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	132,406,742,988.00	132,406,742,987.00	1.00	100.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	-
<b>1.2.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>12,176,900,000.00</b>	<b>9,259,703,881.00</b>	<b>2,917,196,119.00</b>	<b>76.04</b>
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12,176,900,000.00	9,259,703,881.00	2,917,196,119.00	76.04
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>26,830,981,000.00</b>	<b>25,168,719,750.00</b>	<b>1,662,261,250.00</b>	<b>93.80</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	26,830,981,000.00	25,168,719,750.00	1,662,261,250.00	93.80
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>958,869,486,805.00</b>	<b>938,289,860,519.00</b>	<b>20,579,626,286.00</b>	<b>97.85</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,023,823,582,497.00</b>	<b>991,458,595,388.00</b>	<b>32,364,987,109.00</b>	<b>96.83</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>783,107,056,660.00</b>	<b>778,824,078,497.00</b>	<b>4,282,978,163.00</b>	<b>99.45</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	359,528,323,363.00	367,339,345,352.00	-7,811,021,989.00	102.17

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	Persen
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
2.1.2	Belanja Barang	327,163,007,447.00	317,920,470,062.00	9,242,537,385.00	97.17
2.1.3	Belanja Bunga	6,901,834,500.00	4,095,568,133.00	2,806,266,367.00	59.34
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	-
2.1.5	Belanja Hibah	78,551,700,000.00	78,526,503,600.00	25,196,400.00	99.96
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10,962,191,350.00	10,942,191,350.00	20,000,000.00	99.81
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	-
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>236,416,525,837.00</b>	<b>208,334,516,891.00</b>	<b>28,082,008,946.00</b>	<b>88.12</b>
2.2.1	Belanja Tanah	8,079,187,500.00	8,078,058,000.00	1,129,500.00	99.98
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	47,758,854,435.00	45,145,269,569.00	2,613,584,866.00	94.52
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	75,960,731,850.00	68,077,488,803.00	7,883,243,047.00	89.62
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	100,470,373,752.00	83,162,637,319.00	17,307,736,433.00	82.77
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4,147,378,300.00	3,871,063,200.00	276,315,100.00	93.33
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	-
2.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4,300,000,000.00</b>	<b>4,300,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	0.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,023,823,582,497.00</b>	<b>991,458,595,388.00</b>	<b>32,364,987,109.00</b>	<b>96.83</b>
2.4	<b>TRANSFER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
2.4.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	-
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>-64,954,095,692.00</b>	<b>-53,168,734,869.00</b>	<b>-11,785,360,823.00</b>	<b>81.85</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>64,954,095,692.00</b>	<b>64,954,095,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>123,387,095,692.00</b>	<b>123,387,095,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7,509,845,692.00	7,509,845,692.00	0.00	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	107,877,250,000.00	107,877,250,000.00	0.00	100.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	-
3.1.7	Penerimaan Pengeluaran Dana Darurat 2011	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>123,387,095,692.00</b>	<b>123,387,095,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>58,433,000,000.00</b>	<b>58,433,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	100.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	48,433,000,000.00	48,433,000,000.00	0.00	100.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	-



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**NERACA**  
**Per 31 DESEMBER 2012**

URAIAN	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2011 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas</b>		
Kas di Kas Daerah	10,154,995,845.00	7,509,845,692.32
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeeluaran	3,969,543,208.00	2,943,703,792.00
<b>Investasi Jangka Pendek</b>		
<b>Piutang</b>		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi	500,500,000.00	500,500,000.00
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Piutang Lain-lain		
<b>Persediaan</b>	7,711,799,476.00	12,104,857,996.31
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>22,336,838,529.00</b>	<b>23,058,907,480.63</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi NonPermanen</b>		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		

URAIAN	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2011 (Rp)
Investasi Nonpermanen Lainnya		
<b>Jumlah Investasi NonPermanen</b>		
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	52,348,979,466.00	50,348,979,466.00
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
Investasi Permanen Lainnya		
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>52,348,979,466.00</b>	<b>50,348,979,466.00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>52,348,979,466.00</b>	<b>50,348,979,466.00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	327,822,175,304.00	319,744,117,304.00
Peralatan dan Mesin	203,233,548,037.74	158,088,278,468.74
Gedung dan Bangunan	797,458,255,941.00	729,380,767,138.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	786,269,491,462.00	703,106,854,143.00
Aset Tetap Lainnya	10,633,443,314.00	6,762,380,114.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2,125,416,914,058.74</b>	<b>1,917,082,397,167.74</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2,200,102,732,053.74</b>	<b>1,990,490,284,114.37</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,339,178,230.00	559,427,933.82
Hutang Bunga		
Hutang Pajak		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		
Pendapatan Diterima Dimuka		

URAIAN	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2011 (Rp)
Hutang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2,339,178,230.00	559,427,933.82
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Hutang Dalam Negeri		
Hutang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2,339,178,230.00</b>	<b>559,427,933.82</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	11,785,360,823.00	9,894,121,550.50
Cadangan Piutang	500,500,000.00	500,500,000.00
Cadangan Persediaan	7,711,799,476.00	12,104,857,996.31
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran - Hutang Jangka Pendek		
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	19,997,660,299.00	22,499,479,546.81
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	52,348,979,466.00	50,348,979,466.00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,125,416,914,058.74	1,917,082,397,167.74
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran- Hutang Jangka Panjang		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2,177,765,893,524.74	1,967,431,376,633.74
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>2,197,763,553,823.74</b>	<b>1,989,930,856,180.55</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2,200,102,732,053.74</b>	<b>1,990,490,284,114.37</b>

Manokwari, 25 Oktober 2013

Bupati Manokwari



BASTIAN SALABAI





**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Tahun 2012**

NO	URAIAN	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2011 (Rp)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pajak Daerah	10,021,214,863.00	6,382,065,649.00
4	Retribusi daerah	4,566,939,681.00	3,344,331,518.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,958,720,088.00	6,131,109,640.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,497,437,679.00	6,102,479,711.00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	92,922,196,365.00	102,181,458,160.00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38,954,300,225.00	11,678,861,018.00
9	Dana Alokasi Umum	557,019,915,000.00	443,987,821,000.00
10	Dana Alokasi Khusus	54,513,970,000.00	60,673,600,000.00
11	Dana Otonomi Khusus	132,406,742,987.00	149,691,824,802.00
12	Dana Penyesuaian	-	-
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,259,703,881.00	7,560,104,644.00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	19,474,420,000.00
15	Hibah	25,168,719,750.00	47,527,535,600.00
16	Dana Darurat	-	-
17	Pendapatan Lainnya	-	-
18	<b>Jumlah</b>	<b>938,289,860,519.00</b>	<b>864,735,611,742.00</b>
19	<b>Arus Kas Keluar</b>		
20	Belanja Pegawai	367,339,345,352.00	313,670,164,287.76
21	Belanja Barang dan Jasa	317,920,470,062.00	234,729,331,888.00
22	Belanja Bunga	4,095,568,133.00	4,501,912,718.00
23	Belanja Subsidi	-	-

No	URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
		(Rp)	(Rp)
24	Belanja Hibah	78,526,503,600.00	38,023,617,989.00
25	Belanja Bantuan Sosial	10,942,191,350.00	24,745,729,800.00
26	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
27	Belanja Tidak Terduga	4,300,000,000.00	15,950,000,000.00
28	Belanja Bagi Hasil	-	-
29	<b>Jumlah</b>	<b>783,124,078,497.00</b>	<b>631,620,756,682.76</b>
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	155,165,782,022.00	233,114,855,059.24
31			
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>		
33	<b>Arus Kas Masuk</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
40	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41	<b>Arus Kas Keluar</b>		
42	Belanja Tanah	8,078,058,000.00	2,864,458,000.00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	45,145,269,569.00	29,683,794,908.74
44	Belanja Gedung dan Bangunan	68,077,488,803.00	68,073,227,055.00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83,162,637,319.00	60,965,721,720.00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,871,063,200.00	3,856,055,000.00
47	Belanja Aset Lainnya	-	-
48			
49	<b>Jumlah</b>	<b>208,334,516,891.00</b>	<b>165,443,256,683.74</b>
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(208,334,516,891.00)	(165,443,256,683.74)
51	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
52	<b>Arus Kas Masuk</b>		
53	Pencairan Dana Cadangan	-	-
54	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
55	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	107,877,250,000.00	-
56	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-

NO	URAIAN	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2011 (Rp)
57	Penerimaan Piutang	-	-
58	Jumlah	107,877,250,000.00	-
59	<b>Arus Kas Keluar</b>		
60	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
62	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	48,433,000,000.00	57,826,254,249.00
63	Pemberian Pinjaman	-	-
64	Jumlah	50,433,000,000.00	58,826,254,249.00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	57,444,250,000.00	(58,826,254,249.00)
66			
67	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
68	<b>Arus Kas Masuk</b>		
69	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	70,478,417,591.50	56,457,853,515.32
70	Jumlah	70,478,417,591.50	56,457,853,515.32
71	<b>Arus Kas Keluar</b>		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	68,139,239,361.50	55,898,425,581.50
73	Jumlah	68,139,239,361.50	55,898,425,581.50
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran	2,339,178,230.00	559,427,933.82
75			
76	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	6,614,693,361.00	9,404,772,060.32
77	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	7,509,845,692.00	1,048,777,424.00
78	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	10,154,995,845.00	7,509,845,692.32
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3,969,543,208.00	2,943,703,792.00
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
81	Saldo Akhir Kas	14,124,539,053.00	10,453,549,484.32

Manokwari, 25 Oktober 2013

Bupati Manokwari





Lampiran IV: PERATURAN DAERAH

Nomor : 22 TAHUN 2013

Tanggal :25 OKTOBER 2013

**KABUPATEN MANOKWARI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2012. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298 yang mengatur Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan memberikan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 didasarkan pada rencana Anggaran dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD dan realisasi Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2012 yang telah selesai dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemerintah Kabupaten Manokwari secara transparan dan akuntabilitas disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2012 Nomor );
13. Peraturan Bupati Manokwari Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manokwari Tahun Anggaran 2012.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2012 terdiri dari :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II Kinerja Keuangan Daerah**

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Strategi dan prioritas APBD

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

**Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Aset

5.1.5 Kewajiban

5.1.6 Ekuitas dana

5.1.7 Komponen-komponen laporan arus kas

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

**Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan**

**Bab VII Penutup**

**BAB II**  
**KINERJA KEUANGAN DAERAH**

**2.1. Ekonomi Makro**

Secara umum perekonomian Kabupaten Manokwari dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan, walaupun angka pertumbuhannya berfluktuasi dari tahun ke tahun tetapi secara makro angka tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup positif, diakui ada sebagian bidang program masih menunjukkan kontraksi, tetapi secara umum tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan global karena masih banyaknya bidang program yang menunjukkan kinerja yang positif.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2005 (sebagai tahun dasar) hingga tahun 2010 telah berkembang cukup pesat. Pada tahun 2005 PDRB Manokwari berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp .197.553,55 juta, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp 3.060.016,10 juta. Jadi selama kurun waktu 6 tahun PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 2,55 kali lipat dan atas harga konstan 2000 berkembang sebanyak 1,55 kali lipat yaitu dari angka sebesar Rp 772.414,91 juta menjadi Rp 1.197.341,58 juta, pada tahun 2010 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Perkembangan PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2011

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku		PDRB Atas Harga Konstan 2000	
	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)
2005	1.197.553,55	0	772.414,91	0
2006	1.401.718,99	17,05%	831.098,38	7,6%
2007	1.672.598,50	19,32%	904.559,08	8,84%



2008	2.174.188,28	29,99%	996.823,50	10,2%
2009	2.618.216,61	20,42%	1.092.776,53	9,63%
2010*	2.946.679,12	12,55%	1.207.806,42	10,53%
2011**	3.337.649,63	13,27%	1.307.964,69	8,29%

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Sumber : Papua Barat dalam angka 2012

<http://www.scribd.com/doc/76686385/Papua-Barat-Dalam-Angka-2011>

Secara makro pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000. Penggunaan atas harga konstan ini, karena pengaruh harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kenaikan produksi dan jasa. Sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang diukur berdasarkan harga konstan 2000 mengalami kenaikan sebesar 8,29 % yang lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2006 yaitu sebesar 7,6%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi jika dilihat atas dasar harga berlaku, maka tampak bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 13,27 % yang lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2010 yaitu sebesar 12,55 %.

## 2.2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan tahun anggaran 2012 diarahkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan di delapan bidang, guna merealisasikan pencapaian target kinerja sebagaimana termuat dalam dokumen RPJM kabupaten Manokwari Tahun 2012 – 2016. Untuk itu strategi pembangunan

adalah melaksanakan program / kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Manokwari. Adapun prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2012, sebagai berikut :

#### **Pendidikan**

Tujuan : Kebijakan Pembangunan diarahkan untuk bantuan peningkatan kualitas SDM Guru, Mahasiswa, dan Operasional Pendidikan bagi perguruan tinggi di Kabupaten Manokwari serta peningkatan sarana fisik SD sampai SLTA.

Sasaran:

1. Peningkatan sarana fisik SMA berupa ruang belajar dan laboratorium.
2. Pengadaan meubelair jenjang SD dan SMP.
3. Penyelenggaraan bantuan pendidikan bagi Mahasiswa 5.000 orang, untuk tugas belajar S1 450 orang, S2 40 orang, dan Eksakta 120 orang.

#### **Kesehatan**

Tujuan : Kebijakan diarahkan untuk kebutuhan pemenuhan ketersediaan Mobil Ambulan dan obat di tingkat Puskesmas, Pustu, dan Polindes serta peningkatan layanan kesehatan rujukan di RSUD.

Sasaran : Menjaminnya ketersediaan obat dan bahan pakai habis pelayanan secara optimum di tingkat Rumah sakit, Puskesmas, Pustu, dan Polindes.

#### **Pekerjaan Umum**

Tujuan : Diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan sarana dan prasarana jalan serta jembatan, peningkatan air bersih dan berkurangnya kawasan tergenang.

Sasaran :

1. Pembangunan jalan sepanjang 10,5 Km di Sidey, Anggi, Hiri, Sururey, Minyambouw, Didolu, Taige dan Manokwari Barat. Pembangunan jembatan ada 4 unit diantaranya Manokwari Utara, Testega, Prafi dan Masni. Pemeliharaan jalan 44,5 Km di 8 Distrik serta Pemeliharaan Jembatan.
2. Meningkatnya akses terhadap air bersih bagi untuk 3000 jiwa di 21 kampung.
3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 310 m, Drainase dan Gorong-gorong sepanjang 993 Km.

### **Pertanian**

Tujuan : Diarahkan untuk pemeliharaan tanaman kebun sawi rakyat.

Sasaran : Sasaran yang ingin dicapai sampai akhir tahun 2012 yaitu tereliharanya kelapa sawit TBM o seluas 195 Ha di kampung Lismaungu Distrik Prafi.

### **Energi dan Sumber Daya Mineral**

Tujuan : Refitalisasi atas sarana penerangan dalam kota Manokwari.

Sasaran : Berfungsinya lampu penerangan dalam kota Manokwari sepanjang jalan utama dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

### **Keagamaan**

Tujuan : Mendorong peningkatan pemahaman ajaran agama.

Sasaran : Memfasilitasi pembangunan sarana ibadah sebanyak 17 unit dan bantuan pelaksanaan kegiatan keagamaan sebanyak 20 kegiatan.

### **Perikanan**

Tujuan : Mendorong peningkatan akses kelompok nelayan terhadap pemanfaatan sumber daya dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang UU perikanan, meningkatkan manajemen usaha perikanan.

Sasaran : Pengadaan peralatan perkolaman 1 paket, kapal ikan 10 GT sebanyak 1 unit, peralatan tangkap sebanyak 15 paket, Coolbox 25 liter sebanyak 150 buah, Apartemen ikan sebanyak 5 unit dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan, pelatihan keterampilan tentang perikanan.

### **Transmigrasi**

Tujuan : Diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Jasa Pelayanan, Sarana dan Prasarana Jalan serta Jebatan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan di Sp 9, 10, dan 11 melalui peningkatan jalan sepanjang 14 Km dan peningkatan 97 M Jembatan.

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan terlihat dalam tabel berikut ini:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	Persen
<b>PENDAPATAN</b>	<b>958,869,486,805.00</b>	<b>938,289,860,519.00</b>	<b>20,579,626,286.00</b>	<b>97.85</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>32,265,733,128.00</b>	<b>28,044,312,311.00</b>	<b>4,221,420,817.00</b>	<b>86.92</b>
Pendapatan Pajak Daerah	11,322,244,290.00	10,021,214,863.00	1,301,029,427.00	88.51
Pendapatan Retribusi Daerah	5,880,700,000.00	4,566,939,681.00	1,313,760,319.00	77.66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	6,958,720,088.00	6,958,720,088.00	0.00	100.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,104,068,750.00	6,497,437,679.00	1,606,631,071.00	80.18
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>899,772,772,677.00</b>	<b>885,076,828,458.00</b>	<b>14,695,944,219.00</b>	<b>98.37</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	755,189,129,689.00	743,410,381,590.00	11,778,748,099.00	98.44
Dana Bagi Hasil Pajak	103,948,029,633.00	92,922,196,365.00	11,025,833,268.00	89.39
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39,707,215,056.00	38,954,300,225.00	752,914,831.00	98.10
Dana Alokasi Umum	557,019,915,000.00	557,019,915,000.00	0.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	54,513,970,000.00	54,513,970,000.00	0.00	100.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	132,406,742,988.00	132,406,742,987.00	1.00	100.00
Dana Otonomi Khusus	132,406,742,988.00	132,406,742,987.00	1.00	100.00
Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer Pemerintah Provinsi	12,176,900,000.00	9,259,703,881.00	2,917,196,119.00	76.04
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12,176,900,000.00	9,259,703,881.00	2,917,196,119.00	76.04
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>26,830,981,000.00</b>	<b>25,168,719,750.00</b>	<b>1,662,261,250.00</b>	<b>93.80</b>
Pendapatan Hibah	26,830,981,000.00	25,168,719,750.00	1,662,261,250.00	93.80
Pendapatan Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

	Jumlah	958,869,486,805.00	938,289,860,519.00	20,579,626,286.00	97.85
<b>BELANJA</b>		<b>1,023,823,582,497.00</b>	<b>991,161,236,138.00</b>	<b>32,662,346,359.00</b>	<b>96.81</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>783,107,056,660.00</b>	<b>778,526,719,247.00</b>	<b>4,580,337,413.00</b>	<b>99.42</b>
Belanja Pegawai		359,528,323,363.00	367,339,345,352.00	(7,811,021,989.00)	102.17
Belanja Barang		327,163,007,447.00	317,920,470,062.00	9,242,537,385.00	97.17
Belanja Bunga		6,901,834,500.00	4,095,568,133.00	2,806,266,367.00	55.03
Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah		78,551,700,000.00	78,526,503,600.00	25,196,400.00	99.97
Belanja Bantuan Sosial		10,962,191,350.00	10,942,191,350.00	20,000,000.00	99.82
Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>236,416,525,837.00</b>	<b>208,334,516,891.00</b>	<b>28,082,008,946.00</b>	<b>88.12</b>
Belanja Tanah		8,079,187,500.00	8,078,058,000.00	1,129,500.00	99.99
Belanja Peralatan dan Mesin		47,758,854,435.00	45,145,269,569.00	2,613,584,866.00	94.53
Belanja Gedung dan Bangunan		75,960,731,850.00	68,077,488,803.00	7,883,243,047.00	89.62
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		100,470,373,752.00	83,162,637,319.00	17,307,736,433.00	82.77
Belanja Aset Tetap Lainnya		4,147,378,300.00	3,871,063,200.00	276,315,100.00	93.34
Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>4,300,000,000.00</b>	<b>4,300,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Tidak Terduga		4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	0.00	100.00
	Jumlah	1,023,823,582,497.00	991,458,595,388.00	32,364,987,109.00	96.81
<b>TRANSFER</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA		0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Pendapatan lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
	surplus / (Defisit)	(64,954,095,692.00)	(53,168,734,869.00)	(11,785,360,823.00)	81.40
<b>PEMBIAYAAN</b>		<b>64,954,095,692.00</b>	<b>64,954,095,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>		<b>123,387,095,692.00</b>	<b>123,387,095,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Penggunaan sisa Lebih Perhitungan angg. an (SiLPA)		7,509,845,692.00	7,509,845,692.00	0.00	100.00
Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah		107,877,250,000.00	107,877,250,000.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pengeluaran Dana Darurat 2011		8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	100.00

Jumlah	123,387,095,692.00	123,387,095,692.00	0.00	100.00
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>58,433,000,000.00</b>	<b>58,433,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	100.00
Pembayaran Pokok Utang	48,433,000,000.00	48,433,000,000.00	0.00	0.00
Pemberian pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Dana Darurat 2011	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	100.00
Jumlah	58,433,000,000.00	58,433,000,000.00	0.00	100.00
Pembiayaan Neto	64,954,095,692.00	64,954,095,692.00	0.00	100.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	11,785,360,823.00	(11,785,360,823.00)	0.00

Dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2012 terlihat bahwa pendapatan mengalami penurunan dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan setelah perubahan yang ditetapkan adalah sebanyak Rp 958,869,486,805.00 sedangkan realisasinya adalah Rp 938,289,860,519.00. Di antara obyek pendapatan yang mengalami penurunan antara lain berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Hibah. Sedangkan untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Realisasi yang diterima sama dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Untuk rekening Belanja terlihat bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2012 juga mengalami penurunan. Anggaran belanja setelah perubahan yang ditetapkan sebanyak Rp 1.023,823,582,497.00 sementara realisasinya adalah Rp 991,458,595,388.00.

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Diantara hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain adalah karena keterlambatan penerimaan pendapatan dari pusat sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, selain itu juga karena adanya kekurangan SDM yang memadai sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

#### 4.1 Entitas akuntansi

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari selaku pengguna anggaran yang wajib memberikan laporan tentang pengelolaan keuangan yang berada dibidang kewenangannya selaku pengguna anggaran

#### 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas laporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau entitas laporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### 1. Kas

- Kas atau setara kas adalah alat pembayaran yang sah.
- Kas di Kas Daerah adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.
- Kas di Pemegang Kas adalah sisa kas yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk membiayai kegiatan yang masih berada di Satuan Pemegang Kas per 31 Desember 2012 dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

### 2. Piutang

Piutang adalah tagihan yang akan diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.

### 3. Persediaan

- Persediaan adalah barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, persediaan barang produksi dan persediaan barang untuk diperjual belikan.
- Persediaan barang habis pakai dinilai sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan berdasarkan :
  - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga estimasi yang wajar apabila tidak diketahui harga pembelian maupun harga standarnya
  - Persediaan sampai dengan 31 Desember 2012 berdasarkan inventarisasi terdapat di lima SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



#### 4. Investasi Jangka Panjang

- Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Investasi jangka panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi jangka panjang tersebut.
- Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanent dan investasi permanent
- Investasi nonpermanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- Investasi permanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

#### 5. Aset/Aktiva Tetap

- Aset Tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Depresiasi/penyusutan atas aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2012 belum diberlakukan
- Aset tetap yang diperoleh Tahun Anggaran 2012 dinilai sebesar harga perolehan

#### 6. Aset/Aktiva Lain-lain

Aktiva Lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset tetap dan diakui sebesar nilai nominalnya.

#### 7. Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang harus di bayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.

#### 8. Kewajiban Jangka Panjang/Utang Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

## 9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Manokwari yang merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban/Utang.

Ekuitas terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

#### 1. Kebijakan Akuntansi yang Telah Diterapkan

Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan

#### 2. Kebijakan Akuntansi yang Belum Diterapkan

Aset tetap belum dilakukan penyusutan

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

##### 5.1.1 Pendapatan

A. Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp 28,044,312,311.00 yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah sebesar Rp 10,021,214,863.00 yang berasal dari:

• Pajak Hotel	Rp 1,687,867,258.00
• Pajak Restoran	Rp 963,272,411.00
• Pajak Hiburan	Rp 174,828,069.00
• Pajak Reklame	Rp 1,759,275,686.00
• Pajak Penerangan Jalan	Rp 1,579,802,643.00
• Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp 141,779,000.00
• Pajak Air Bawah Tanah	<u>Rp 3,714,389,796.00</u>
Jumlah	Rp 10,021,214,863.00

2) Retribusi Daerah sebesar Rp 4,566,939,681.00 yang berasal dari:

• Retribusi Jasa Umum	Rp 2,180,302,506.00
• Retribusi Jasa Usaha	Rp 498,936,875.00
• Retribusi Perizinan Tertentu	<u>Rp 1,887,700,300.00</u>
Jumlah	Rp 4,566,939,681.00

**3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar**

**Rp 6.958.720.088,00 yang berasal dari:**

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah	<u>Rp 6.958.720.088,00</u>
Jumlah	Rp 6.958.720.088,00

**4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 6,497,437,679.00 yang berasal dari:**

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan Rp 474,831,427.00

- Penerimaan Jasa Giro Rp 665,356,369.00

- Pendapatan Bunga Deposito Rp 58,331,730.00

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan Rp 290,478,447.00

- Pendapatan Denda Retribusi Rp 10,350,000.00

- Pendapatan dari Pengembalian Rp 4,991,089,706.00

- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Rp 7,000,000.00

Jumlah Rp 6,497,437,679.00

**B. Pendapatan Transfer Sebesar Rp 885,076,828,458.00 yang terdiri dari:**

**1.) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Sebesar Rp 743,410,381,590.00 terdiri dari:**

**a) Dana Bagi Hasil Pajak Rp 92,922,196,365.00 yang terdiri dari:**

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
  - Pertambangan Migas Rp 75,961,326,747.00
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)
  - Pasal 21,25 dan 29 Rp 6,527,232,101.00
- Bagi Hasil PBB Perkotaan / Desa Rp 2,698,531,942.00
- Bagi Hasil PBB Perkotaan / Desa Bag. Pusat Rp 3,967,872,272.00
- Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Migas Rp 2,524,725,831.00
- Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan Rp 1,242,507,472.00
- Jumlah Rp 92,922,196,365.00

**b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp 38,954,300,225.00 yang terdiri dari:**

- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp 3,128,146,949.00
- Bagi Hasil dari Dana Reboisasi Rp 1,223,069,636.00
- Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) Rp 294,681,330.00
- Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan

• Iuran Eksploitasi (Royalti)/ Pertum	Rp	249,189,682.00
• Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp	343,986,219.00
• Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Rp	4,180,693,521.00
• Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	Rp	310,218,581.00
• Dana Otsus Bagi Hasil Migas	<u>Rp</u>	<u>29,224,314,307.00</u>
Jumlah	Rp	38,954,300,225.00

c) Dana Alokasi Umum Rp 557,019,915,000.00

d) Dana Alokasi Khusus Rp 54,513,970,000.00

**2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp 149,691,824,802.00 dari Dana Otonomi Khusus terdiri dari:**

• Dana Otonomi Khusus	<u>Rp</u>	<u>132,406,742,987.00</u>
Jumlah	Rp	132,406,742,987.00

**3) Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp 9,259,703,881.00 yang terdiri dari:**

• Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	2,055,426,093.00
• Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend. Bermotor	Rp	2,307,757,565.00
• Bagi Hasil Pajak Bhn. Bakar Kend. Bermotor	<u>Rp</u>	<u>4,896,520,223.00</u>
Jumlah	Rp	9,259,703,881.00

4) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 25,168,719,750.00 yang terdiri dari:

• Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Rp 24,633,434,000.00
• Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	<u>Rp 535,285,750.00</u>
Jumlah	Rp 25,168,719,750.00

5.1.2 Belanja

1) Belanja Operasi sebesar Rp 778,824,078,497.00 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 367,339,345,352.00 berasal dari:

1.) Belanja Tidak Langsung Rp 304,274,557,784.00 terdiri dari:

• Gaji dan tunjangan	Rp 298,112,078,984.00
• Tambahan penghasilan PNS	Rp 849,292,000.00
• Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	<u>Rp 5,313,186,800.00</u>
Jumlah	Rp 262,701,492,987.76

2.) Belanja Langsung Rp 63,064,787,568.00 terdiri dari:

• Honorarium PNS	Rp 21,670,376,500.00
• Honorarium non PNS	Rp 32,961,344,000.00
• Uang lembur	Rp 1,139,213,500.00

• Belanja beasiswa pendidikan PNS	Rp 3,536,000,000.00
• Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	<u>Rp 3,757,853,568.00</u>
Jumlah	Rp 63,064,787,568.00

**b. Belanja Barang dan Jasa Rp 317,920,470,062.00 yang terdiri dari:**

• Belanja bahan pakai habis	Rp 75,302,548,155.00
• Belanja bahan / material	Rp 19,227,552,996.00
• Belanja jasa kantor	Rp 117,694,885,387.00
• Belanja perawatan kendaraan bermotor	Rp 10,528,600,102.00
• Belanja cetak dan penggandaan	Rp 5,860,056,984.00
• Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	Rp 2,988,728,292.00
• Belanja sewa sarana mobilitas	Rp 6,646,420,000.00
• Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 218,980,000.00
• Belanja makanan dan minuman	Rp 22,120,191,210.00
• Belanja pakaian dinas dan atributnya	Rp 2,090,052,000.00
• Belanja pakaian kerja	Rp 115,081,818.00
• Belanja pakaian khusus dan hari-hari Tertentu	Rp 1,938,065,000.00
• Belanja perjalanan dinas	Rp 48,478,151,500.00



• Belanja perjalanan pindah tugas	Rp	199,987,800.00
• Belanja Pemeliharaan	Rp	4,328,368,818.00
• Belanja Jasa Konsultansi	Rp	<u>182,800,000.00</u>
Jumlah	Rp	317,920,470,062.00

c. Belanja Bunga Dari Bunga Utang Pinjaman sebesar Rp 4,095,568,133.00

d. Belanja Subsidi Rp 0,00

e. Belanja Hibah Rp 78,526,503,600.00 yang terdiri dari:

• Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya	Rp	11,000,000,000.00
• Belanja hibah kepada Badan/ lembaga/organisasi swasta	Rp	31,937,534,533.00
• Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan	Rp	<u>35,588,969,067.00</u>
Jumlah	Rp	78,526,503,600.00

**f. Belanja Bantuan Sosial Rp 10,942,191,350.00 yang terdiri dari:**

1) Bel. bantuan sosial org.kemasyarakatan	Rp 10,915,691,350.00
2) Bel. bantuan partai politik	Rp <u>26,500,000.00</u>
Jumlah	Rp 10,942,191,350.00

**g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 0.00**

**2) Belanja Modal Rp 208,334,516,891.00 yang terdiri dari:**

a. Belanja Tanah	Rp 8,078,058,000.00
b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 45,145,269,569.00 yang terdiri dari:	
• Alat-alat angkutan darat bermotor	Rp 11,636,202,317.00
• Alat-alat angkutan di air tidak bermotor	Rp 10,500,000.00
• Alat-alat bengkel	Rp 2,438,891,730.00
• Alat-alat pengolahan pertanian & peternakan	Rp 2,650,536,000.00
• Peralatan kantor	Rp 635,769,995.00
• Perlengkapan kantor	Rp 525,857,000.00
• Komputer	Rp 4,840,855,316.00
• Mebeulair	Rp 11,306,599,000.00
• Peralatan dapur	Rp 202,649,000.00
• Alat-alat studio	Rp 613,515,000.00
• Alat-alat komunikasi	Rp 169,324,575.00
• Alat-alat ukur	Rp 8,000,000.00

• Alat-alat kedokteran	Rp	7,980,239,636.00
• Alat-alat laboratorium	Rp	<u>2,126,330,000.00</u>
Jumlah	Rp	45,145,269,569.00
<b>c. Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>68,077,488,803.00</b>
<b>d. Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp 83,162,637,319.00 yang terdiri dari:</b>		
• Konstruksi jalan	Rp	50,729,901,728.00
• Konstruksi jembatan	Rp	9,216,655,850.00
• Konstruksi jaringan air	Rp	15,601,454,312.00
• Penerangan jalan,taman hutan kota	Rp	568,812,000.00
• Instalasi listrik dan telepon	Rp	<u>7,045,813,429.00</u>
Jumlah	Rp	83,162,637,319.00
<b>e. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 3,871,063,200.00 yang terdiri dari:</b>		
• Buku	Rp	3,524,835,200.00
• Barang bercorak kesenian	Rp	219,000,000.00
• hewan / ternak dan tanaman	Rp	<u>127,228,000.00</u>
(Benih Ikan Sebanyak 425 Ekor)		
Jumlah	Rp	3,871,063,200.00
<b>f. Belanja Aset Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>0.00</b>

3) Belanja Tidak Terduga Rp 4,300,000,000.00

### 5.1.3 Pembiayaan

a. Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp 123,387,095,692.00 terdiri dari:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)	Rp	7,509,845,692.00
2) Pencairan dana cadangan	Rp	0.00
3) Hasil penj. kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	0.00
4) Penerimaan pinj. daerah & penerbitan obligasi	Rp	107,877,250,000.00
5) Penerimaan kembali pinjaman daerah	Rp	0.00
6) Penerimaan piutang	Rp	0.00
7) Penerimaan pengeluaran dana darurat 2011	Rp	<u>8,000,000,000.00</u>
Jumlah	Rp	123,387,095,692.00

b. Pembiayaan Pengeluaran Rp 58,433,000,000.00 terdiri dari:

1) Pembentukan dana cadangan	Rp	0.00
2) Penyertaan modal (investasi) pem. Daerah	Rp	2,000,000,000.00
3) Pembayaran pokok utang	Rp	48,433,000,000.00
4) Pemberian pinjaman	Rp	0.00
5) Pengeluaran dana darurat 2011	Rp	<u>8,000,000,000.00</u>
Jumlah	Rp	58,433,000,000.00

**5.1.4 Komponen – Komponen Neraca yang terdiri dari :**

**5.1.4.1 Aset**

1) Kas di kasda Rp 10,154,995,845.00 Merupakan saldo kas di BUD sampai dengan 31 Desember 2012 Kasda tersebut terdapat di beberapa Bank yaitu:

Saldo Bank Papua	Rp	8,674,975,564.00
Saldo Bank BNI (1)	Rp	231,039,148.00
Saldo Bank BNI (2)	Rp	78,652,659.00
Saldo Bank BRI	Rp	30,492,269.00
Saldo Bank Danamon	Rp	45,618,476.00
Saldo Bank Mandiri (1)	Rp	39,640,738.00
Saldo Bank Mandiri (2)	Rp	79,227,746.00
Koreksi Bank (Terlampir)	<u>Rp</u>	<u>975,349,245.00</u>
	<b>Rp</b>	<b>10,154,995,845.00</b>

No	No SKPD	SKPD	UUDP
1	2	3	4
1	1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	589,773,298.00
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	37,512,100.00
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	176,717,458.00
4	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	70,672,000.00
5	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	198,837,800.00
6	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,957,000.00

7	1.08.05	Badan Lingkungan Hidup	1,062,105.00
8	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64,802,250.00
9	1.13.01	Dinas Kesejahteraan Sosial	377,450,440.00
10	1.13.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,686,079.00
11	1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38,745,000.00
12	1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,666,665.00
13	1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	8,724,293.00
14	1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,200,000.00
15	1.20.02.01	Kepala Daerah (KDH)	40,344,200.00
16	1.20.02.02	wakil Kepala Daerah (WKDH)	26,000,000.00
17	1.20.03	Sekretariat Daerah	11,013,200.00
18	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1,704,452,088.00
19	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	249,944,150.00
20	1.20.07	Inspektorat Kabupaten	90,713,636.00
21	1.20.09.01	Distrik Se-Kabupaten Manokwari	2,225,000.00
22	1.20.09.03	Distrik Masni	42,185,000.00
23	1.21.02	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan	49,657,480.00
24	1.22.02	Badan Pemberdayaan Masyarakat	5,621,468.00
25	2.01.01	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	

			141,914,400.00
20)	Kas & bendahara pengeluaran	Kantor Perwakilan Papua	3,969,543,208.00
27	2.02.01	Dinas Kehutanan	250,000.00
28	2.07.01	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3,379,028.00

Merupakan Saldo Kas dalam bentuk UUDP yang belum di setor ke Kas di Kasda sampai

**Jumlah 3,969,543,208**

3) Piutang Retribusi Rp 500.500.000,00 Sewa alat berat pada Dinas PU

4) Persediaan Rp 7,711,799,476.00 yang terdapat di beberapa Dinas :

No	Dinas	Persediaan
1	Dinas Pendidikan	3,235,500.00
2	Dinas Kesehatan	3,974,529,696.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3,157,293,780.00
4	Dinas Pekerjaan Umum	2,176,500.00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	574,564,000.00
	Jumlah	<b>7,711,799,476.00</b>

5) Investasi Jangka Panjang Rp 52,348,979,466.00 terdiri dari penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada bank Papua Rp 43,140,000,000.00 dan kepada PDAM Rp 9,208,979,466.00

6) Aset Tetap Rp 2,125,416,914,058.74 terdiri dari:

2) Tanah	Rp	327,822,175,304.00
3) Peralatan dan mesin	Rp	203,233,548,037.74
4) Gedung dan bangunan	Rp	797,458,255,941.00
5) Jalan, irigasi dan jaringan	Rp	786,269,491,462.00
6) Aset tetap lainnya	Rp	<u>10,633,443,314.00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>2,125,416,914,058.74</b>
7) Dana Cadangan	Rp	0,00
8) Aset Lain-lain	Rp	0,00

5.1.4.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek berasal dari:

Hutang PFK Rp 2,339,178,230.00

Merupakan saldo Hutang Perhitungan Pihak Ketiga dalam bentuk hutang pajak per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

No	Kode	Nama Rekening	Penerimaan	Penyetoan	Saldo Utang Pajak
1	2110101	Utang Taspeii	-	-	-
2	2110301	Utang PPh Pusat	3,042,831,706.00	2,976,880,048.00	65,951,658.00
3	2110401	Utang PPh Pusat	11,099,998,648.00	11,304,610,061.00	(204,611,413.00)
4	2110601	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	271,745.00	(271,745.00)
5	2110602	Iuran Wajib Pajak ( IWP)	17,285,236,103.00	14,803,203,296.00	2,482,032,807.00
6	2110603	Potongan Beras	13,342,633,566.00	13,364,266,500.00	(21,632,934.00)
7	2110604	TWPP	434,217,903.00	422,049,000.00	12,168,903.00



8	2110605	Sewa Rumah	4,967,189.00	-	4,967,189.00
9	2130101	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	13,898,902,938.50	14,057,251,005.50	(158,348,067.00)
10	2130201	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	1,427,791,772.00	1,442,743,498.00	(14,951,726.00)
11	2130202	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	715,656,107.00	680,199,688.00	35,456,419.00
12	2130301	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	9,212,401,000.00	9,087,764,520.00	124,636,480.00
13	4140601	Bidang Pendidikan	8,650,659.00	-	8,650,659.00
14	4140602	Bidang Kesehatan	5,130,000.00	-	5,130,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>70,478,417,591.50</b>	<b>68,139,239,361.50</b>	<b>2,339,178,230.00</b>

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

**Rp**

**0,00**

#### 5.1.4.3 Ekuitas Dana

**a. Ekuitas Dana Lancar Rp 19,997,660,299.00 yang berasal dari:**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	11,785,360,823.00
Cadangan Piutang	Rp	500.500.000,00
Cadangan Persediaan	Rp	<u>7,711,799,476.00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>19,997,660,299.00</b>

**b. Ekuitas Dana Investasi Rp 2,177,765,893,524.74 yang terdiri dari:**

- Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Rp 52,348,979,466.00

• Diinvestasikan dalam aset tetap	<u>Rp 2,125,416,914,058.74</u>
Jumlah	Rp 2,177,765,893,524.74

c. Ekuitas Dana Cadangan Rp 0,00

### 5.1.5 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

#### a. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

##### 1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 938,289,860,519.00 adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan Operasional dalam T.A 2012 yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah	Rp	10,021,214,863.00
2) Retribusi Daerah	Rp	4,566,939,681.00
3) Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dpshkn	Rp	6,958,720,088.00
4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp	6,497,437,679.00
5) Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	92,922,196,365.00
6) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	38,954,300,225.00
7) Dana Alokasi Umum	Rp	557,019,915,000.00
8) Dana Alokasi Khusus	Rp	54,513,970,000.00
9) Dana Otonomi Khusus	Rp	132,406,742,987.00
10) Dana Penyesuaian	Rp	0.00
11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	9,259,703,881.00
12) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0.00

13) Hibah	Rp	<u>25,168,719,750.00</u>
Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi	Rp	938,289,860,519.00

## 2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 782,826,719,247.00 adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2012, terdiri atas :

g. Belanja Pegawai	Rp	367,339,345,352.00
h. Belanja Barang	Rp	317,920,470,062.00
i. Belanja Bunga	Rp	4,095,568,133.00
j. Subsidi	Rp	0.00
k. Hibah	Rp	78,526,503,600.00
l. Bantuan Sosial	Rp	10,942,191,350.00
m. Bantuan Keuangan	Rp	0.00
n. Belanja Tak Terduga	Rp	4,300,000,000.00
o. Belanja Bagi Hasil	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi	Rp	783,124,078,497.00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>155,165,782,022.00</b>

## b. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

### 1. Arus Kas Masuk

Dalam Tahun Anggaran 2012 Penerimaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tidak ada realisasi

## 2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi Belanja modal dalam tahun anggaran 2012 sebesar Rp 208,334,516,891.00 yang dirinci menurut Objek Belanja sebagai berikut:

a) Belanja Tanah	Rp 8,078,058,000.00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 45,145,269,569.00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 68,078,488,803.00
d) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp 83,162,637,319.00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 3,871,063,200.00</u>
JUMLAH	Rp 208,334,516,891.00

**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Adalah Rp (208,334,516,891.00)**

## c. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

### 1. Arus Kas Masuk

Dalam Tahun Anggaran 2012 Penerimaan Arus Kas Masuk dari aktivitas pembiayaan terdapat penerimaan pinjaman dari Bank Papua Daerah sebesar Rp. 107,877,250.000.

### 2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp 50,433,000,000.00 berasal dari:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah pada Bank Papua | Rp 2,000,000,000.00  |
| b) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman pada Bank Papua Daerah sebesar | Rp 48,433,000,000.00 |

**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Sebesar Rp 57,444,250,000.00**

**d. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN**

**1. Arus kas masuk**

Terdiri dari penerimaan perhitungan pihak ketiga sebesar Rp. 70,478,417,591.50

**2. Arus kas keluar**

Terdiri dari pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 68,139,239,361.50

**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran sebesar Rp 2,339,178,230.00**

**RINCIAN SALDO KAS**

**# Kenaikan Bersih Kas selama Periode T.A 2012 :**

I Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	155,165,782,022.00
II Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(208,334,516,891.00)
III Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	57,444,250,000.00
IV Arus Kas Bersih dari Aktivitas NonAnggaran	Rp	<u>2,339,178,230.00</u>
<b>Total Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode T.A 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>6,614,693,361.00</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>Rp</b>	<b>7,509,845,692.00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>Rp</b>	<b>10,154,995,845.00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp</b>	<b>3,969,443,208.00</b>
<b># Saldo Akhir Kas</b>	<b>Rp</b>	<b>14,124,539,053.00</b>

**KESIMPULAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012 ADALAH:**

a. Pendapatan	: Rp. 938,289,860,519.00	
b. Belanja	: <u>Rp. 991,458,595,388.00 -</u>	
Surplus (defisit)		Rp. (53,168,734,869.00)
c. Penerimaan	: Rp. 123,387,095,692.00	
d. Pengeluaran	: <u>Rp. 58,433,000,000.00 -</u>	
Surplus		<u>Rp. 64,954,095,692.00</u>
	SILPA (SIKPA)	Rp. 11,785,360,823.00

**Laporan Realisasi Anggaran**

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan:	Rp. 958,869,486,805.00	
b. Realisasi	: <u>Rp. 938,289,860,519.00 -</u>	
	Selisih lebih/kurang	Rp. 20,579,626,286.00

**Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja**

a. Anggaran belanja setelah perubahan	: Rp. 1.023,823,582,497.00	
b. Realisasi	: <u>Rp. 991,458,595,388.00 -</u>	
	Selisih lebih/kurang	Rp. 32,364,987,109.00

**Selisih Anggaran dengan Surplus Defisit**

a. Surplus/defisit setelah perubahan	: Rp. (64,954,095,692.00)	
b. Realisasi	: <u>Rp. (53,168,734,869.00) -</u>	
	Selisih lebih/kurang	Rp.(11,785,360,823.00)

**Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 123,387,095,692.00	
-----------------------------------	--------------------------	--

b. Realisasi : Rp. 123,387,095,692.00 -  
Selisih lebih/kurang Rp 0.00

**Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 58,433,000,000.00  
b. Realisasi : Rp. 58,433,000,000.00 -  
Selisih lebih / kurang Rp. 0.00

**Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto**

a. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan: Rp. 64,954,095,692.00  
b. Realisasi : Rp. 64,954,095,692.00 -  
Selisih lebih / kurang Rp. 0.00

**Neraca**

a. Jumlah Aset Rp. 2,200,102,732,053.74  
b. Jumlah Kewajiban Rp. 2,339,178,230.00  
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2,197,763,553,823.74

**Laporan Arus Kas**

a. Saldo Kas Awal per 31 Desember 2012 Rp 7,509,845,692.00  
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasional Rp 155,165,782,022.00  
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Rp (208,334,516,891.00)  
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 57,444,250,000.00

e.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp <u>2,339,178,230.00</u>
f.	Saldo Kas per 31 Desember 2012	Rp 14,124,539,053.00

(Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah)



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Sampai dengan akhir 31 Desember 2012 pelaksanaan tugas- tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manokwari secara umum dapat terselenggara dengan baik, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP setiap tahun telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada visi dan misi daerah. Tahun demi tahun prioritas pembangunan daerah telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata bertujuan unruk mempercepat kemajuan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Manokwari.

Kemajuan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2012, secara merambat namun pasti telah memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kemajuan daerah di berbagai bidang. Sungguhpun prioritas-prioritas pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah daerah masih dihadapkan dengan kemampuan penerimaan keuangan daerah, hal ini tidak mengurangi tekad pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Manokwari yang kita cintai bersama. Melalui laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012, seluruh rangkaian tugas-tugas pemerintahan selama tahun 2012, telah disampaikan laporan secara transparan dan akuntabilitas sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pemerintah di tahun 2012. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, yang telah diuraikan secara detail dan terperinci serta diformulasikan dalam buku rancangan penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, disertai Rancangan Peraturan Daerah dan Catatan Laporan Atas Keuangan dan Lampiran Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, guna memperoleh penetapan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Manokwari terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012. Mengakhiri Catatan Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, saya mempersilahkan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama meneliti lebih lanjut Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 secara menyeluruh, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Catatan Laporan Keuangan dan buku-buku tersebut diatas sebagai materi persidangan.

Selamat bersidang. Tuhan memberkati kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Manokwari, 25 Oktober 2013





